



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MARYONO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 852436

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m²/140 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/120 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
3. Tanah Seluas 338 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
4. Tanah Seluas 339 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m²/25 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m²/110 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/160 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 381.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000



2. MOTOR, HONDA NF11A1C M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.	
3.500.000	
3. MOBIL, HONDA HRV RU1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.	
250.000.000	
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.	
80.000.000	
5. MOBIL, SUZUKI ST-150 PICK UP Tahun 2016, HASIL SENDIRI	
Rp. 35.000.000	
6. MOTOR, VIAR VR 150 3R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.	
8.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 405.010.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 1.507.570.438
F. HARTA LAINNYA	Rp. 250.000.000
Sub Total	Rp. 12.018.580.438
III. HUTANG	Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 12.018.580.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.